MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi
https://journal.yp3a.org/index.php/MUKASI
e-ISSN 2828-3449 | p-ISSN 2828-3589
Vol. 5 No. 2 (Mei 2026) 1300-1314
DOI: 10.54259/mukasi.v5i2.7578

Model Partisipatif Pengelolaan Pariwisata Bahari oleh Masyarakat Bajo di Pulau Labengki

Nana Adriana Hutari[1], Ashar Hasyim[2], Andi Resmiyanti[3]
[1,2,3]Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara
Email: [1]nanaadrianahutarii@gmail.com, [2*]asharhasyim50@gmail.com., [3]andiresmiyanti@gmail.com

Abstract

The participatory communication model in marine tourism management can be used as a reference in managing marine tourism that maximally involves community participation. The community must be involved in marine tourism management. Community participation is important because the community in tourism management is positioned as an 'object of tourism management' rather than a 'subject of tourism management.' This study focuses on the participatory communication model of the Bajo community in marine tourism management on Labengki Island. The research findings indicate that participatory communication of the Bajo community in marine tourism management is carried out through various activities. The Bajo community participates in planning, management, decision-making, and evaluation of tourism management activities. In addition, community empowerment in managing marine tourism on Labengki Island can be seen with the existence of homestays owned and managed by the Bajo community to support tourism. The Bajo community is also involved in providing tourism transportation, specifically boats, thereby improving the local economy. The Bajo community receives training from the government in managing homestays, becoming tour guides, and maintaining the tourism environment on Labengki Island.

Keywords: *Model, Communication, Participatory, Empowerment*

Abstrak

Model Komunikasi partisipatif dalam pengelolaan pariwisata bahari dapat digunakan sebagai rujukan dalam pengelolaan pariwisata bahari yang melibatkan partisipasi masyarakat secara maksimal. Masyarakat harus terlibat dalam pengelolaan pariwisata bahari. Partispasi masyarakat menjadi penting, sebab masyarakat dalam pengelolaan pariwisata diposisikan sebagai ”objek pengelolaan pariwisata” bukan sebagai “subjek pengelolaan pariwisata”. Penelitian ini berfokus pada model komunikasi partisipatif masyarakat Bajo dalam pengelolaan pariwisata bahari di pulau Labengki. Hasil penelitian menemukan bahwa Komunikasi partisipatif masyarakat Bajo dalam pengelolaan pariwisata bahari dilakukan dengan berbagai kegiatan. Partisipasi masyarakat Bajo terlibat dalam perencanaan, pengelolaan, pengambilan keputusan, serta evaluasi kegiatan pengelolaan pariwisata. Selain itu, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata bahari di pulau Labengki dapat kita temukan dengan adanya *homestay* yang dimiliki serta dikelola oleh masyarakat bajo guna menunjang pariwisata, masyarakat bajo juga terlibat dalam penyediaan alat transportasi pariwisata yaitu perahu sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Masyarakat Bajo mendapatkan pelatihan dari pemerintah dalam pengelolaan *homestay*, menjadi *tour guide* serta menjaga lingkungan pariwisata pulau Labengki.

Submitted: 13-04-2026 | Accepted: 24-04-2026 | Published: 15-05-2026

Kata Kunci: Model, Komunikasi, Partisipatif, Pemberdayaan

PENDAHULUAN

Pulau Labengki di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, merupakan salah satu destinasi wisata bahari unggulan di Indonesia. Keindahan alamnya yang mencakup formasi karst, laguna tersembunyi, dan kekayaan biodiversitas laut menjadikan wilayah ini sangat potensial untuk pengembangan ekowisata. Pesona alam ini menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Di tengah geliat pertumbuhan pariwisata tersebut, terdapat komunitas masyarakat Bajo yaitu suku maritim yang hidup berdampingan dengan laut secara turun-temurun dan menjadikan laut sebagai bagian dari identitas budaya dan sumber utama penghidupan (Harlina et al., 2023).

Masyarakat Bajo memiliki pengetahuan lokal dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut, yang diwariskan secara lisan dan melekat dalam praktik kehidupan sehari-hari. Namun, dalam praktik pengelolaan pariwisata, kontribusi pengetahuan lokal ini sering kali belum diarusutamakan. Masyarakat Bajo cenderung hanya dilibatkan sebagai penyedia jasa atau pekerja informal, bukan sebagai mitra strategis dalam pengambilan keputusan. Hal ini berisiko menimbulkan konflik kepentingan, mereduksi nilai-nilai budaya lokal, dan melemahkan komitmen terhadap pelestarian lingkungan bahari (Ode et al., 2023).

Pada tahun 2024, Desa Labengki berhasil menempati 50 besar dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) dari 6.016 desa wisata peserta, serta meraih juara 1 kategori Desa Wisata Berkembang pada ADWI 2024 (Harlina et al., 2023). Kehidupan masyarakat Bajo turut menjadi atraksi utama, seperti program “living like a Bajo” yang memperlihatkan kehidupan, masakan lokal, dan kegiatan memancing tradisional. keberadaan masyarakat Bajo sebagai suku maritim yang memiliki kearifan lokal dalam menjaga ekosistem laut. Meski memiliki peran penting, masyarakat Bajo belum dimaksimalkan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan pariwisata. Belum maksimalnya ketrlibatan masyrakat bajo dalam pengelolaan pariwisata berpotensi menimbulkan konflik, melemahkan nilai budaya lokal, dan mengancam keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan pariwisata bahari yang berkelanjutan membutuhkan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata (Wa Ode Astuti, 2025).

Kajian mengenai pengelolaan pariwisata bahari dalam perspektif komunikasi menunjukkan perkembangan yang semakin mengarah pada pendekatan partisipatif sebagai respons terhadap keterbatasan model pembangunan yang bersifat top-down (Bintan & Riau, 2024). Dalam konteks ini, komunikasi tidak lagi diposisikan sebagai alat penyampaian informasi semata, tetapi sebagai proses sosial yang memungkinkan terjadinya dialog, negosiasi makna, dan pembentukan kesepahaman kolektif antar pemangku kepentingan. Perspektif ini sejalan dengan pemikiran Paulo Freire yang menekankan komunikasi dialogis sebagai dasar pemberdayaan, serta dikembangkan lebih lanjut dalam kerangka komunikasi pembangunan oleh Jan Servaes melalui pendekatan *bottom-up* yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pembangunan (Latzlawick, 2013).

Penelitian mengenai *community-based tourism* (CBT) umumnya masih berfokus pada aspek kelembagaan, distribusi manfaat ekonomi, dan partisipasi formal masyarakat, tanpa mengkaji secara mendalam proses interaksi komunikasi di tingkat mikro. Akibatnya, dimensi komunikasi dialogis seperti negosiasi makna, relasi kuasa, dan pertukaran pengetahuan lokal cenderung terabaikan. Keterbatasan ini menunjukkan adanya kekosongan literatur terkait komunikasi partisipatif yang substantif dalam praktik sosial masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan komunikasi sebagai proses inti dalam membentuk kualitas partisipasi pengelolaan pariwisata bahari, khususnya pada

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

masyarakat Bajo yang memiliki karakter komunikasi berbasis kearifan lokal dan interaksi keseharian. Akibatnya, partisipasi yang terjadi seringkali bersifat prosedural dan belum mencerminkan keterlibatan substantif masyarakat dalam pengambilan keputusan (Harlina et al., 2023).

Telah banyak penelitian terdahulu yang mengakaji mengenai komunikasi pariwisata, namun masih sedikit yang mengangkat terkait dengan pengelolaan pariwisata bahari yang melibatkan masyarakat Bajo. Dengan adanya penelitian terdahulu, dapat diidentifikasi kesenjangan penelitian. belum adanya model komunikasi partisipatif yang secara khusus yang dirancang untuk konteks pengelolaan pariwisata bahari. model pengelolaan pariwisata bahari yang tidak hanya mengedepankan keberlanjutan lingkungan, tetapi juga menjamin keterlibatan aktif dan adil dari masyarakat lokal dalam hal ini masyarakat Bajo di Pulau Labengki (Harlina et al., 2023). Di tengah meningkatnya tekanan terhadap ekosistem laut akibat pertumbuhan pariwisata, dibutuhkan pendekatan komunikasi partisipatif dalam pengelolaan pariwisata bahari. Dengan pendekatan partisipatif, diharapkan penelitian dapat mendorong tata kelola pariwisata yang inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi semua pihak (Wisata et al., 2020).

Penenlitian ini menarik karena karakter komunikasi partisipatif masyarakat Bajo yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan melalui teori komunikasi partisipatif konvensional. Berbeda dengan komunitas lain yang mengandalkan forum formal, masyarakat Bajo membangun komunikasi dialogis yang kontekstual, berbasis relasi kekerabatan, dan terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari sebagai masyarakat maritim. Hambatan komunikasi tidak hanya dipengaruhi akses informasi dan pendidikan, tetapi juga pola hidup melaut, mobilitas tinggi, serta dominasi komunikasi informal yang menyebabkan partisipasi dalam forum formal tidak merata. Selain itu, dominasi aktor tertentu menunjukkan bahwa komunikasi partisipatif berlangsung dalam negosiasi struktur sosial lokal. Temuan ini memperluas pemahaman teoretis bahwa komunikasi dialogis dalam budaya maritim tidak selalu berlangsung dalam ruang formal, tetapi hidup dalam interaksi sosial berbasis pengalaman kolektif. Penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan kajian komunikasi pembangunan berbasis kearifan lokal, memperkaya studi komunikasi komunitas maritim, serta menghasilkan model aplikatif untuk mendukung pengelolaan pariwisata bahari berkelanjutan.Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus penelitian ini adalah; (1). bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat bajo dalam pengelolaan pariwisata bahari di pulau labengki ? (2). bagaimana model pengelolaan pariwisata bahari di pulau labengki.

Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik mengenai model komunikasi parsipatif yang relevan secara lokal namun juga aplikatif secara luas, serta memaksimalkan keterlibatan Masyarakat bajo dalam pengelolaan pariwisata bahari yang menyentuh ruang hidup dan budaya mereka.

TINJAUAN PUSTAKA

Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengelolaan Pariwisata.

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Dalam perspektif *community-based tourism* (CBT), partisipasi masyarakat tidak hanya dilihat sebagai kehadiran dalam kegiatan wisata, tetapi sebagai keterlibatan aktif dalam proses perencanaan, pengelolaan, hingga evaluasi. Puspitaningrum dan Kuntari (2021) menekankan bahwa pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan budaya. Dalam pengelolaan pariwisata keterlibatan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan keseimbangan antara aspek ekonomi dan konservasi dalam pariwisata.

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ratnasari dan Levyda (2024) mengenai pengembangan desa wisata berbasis CBT di Belitung, bahwa partisipasi masyarakat berperan dalam memperkuat kapasitas kelembagaan lokal serta meningkatkan rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap destinasi wisata. Namun, partisipasi masyarakat juga masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan pengetahuan dan dominasi aktor tertentu dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat tidak selalu berjalan optimal tanpa adanya dukungan komunikasi dan pemberdayaan yang memadai.

Permadi, Wanusmawatie, dan Khairina (2024) melalui pendekatan *systematic literature review* mengungkap bahwa penerapan CBT secara konsisten mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat kohesi sosial, serta melestarikan budaya dan lingkungan. keterlibatan masyarakat tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan identitas komunitas. Dengan demikian, partisipasi masyarakat memiliki dimensi multidimensional yang mencakup aspek sosial, budaya, dan ekologis.

keterlibatan masyarakat memiliki peran strategis dalam meningkatkan efektivitas, keberlanjutan, dan keberhasilan pengelolaan pariwisata. Namun demikian, tantangan seperti keterbatasan kapasitas, ketimpangan kekuasaan, serta kurangnya komunikasi yang partisipatif masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan model komunikasi partisipatif yang mampu memperkuat keterlibatan masyarakat secara substantif, sehingga tidak hanya terlibat secara formal, tetapi juga memiliki peran nyata dalam menentukan arah pengelolaan pariwisata (Ratnasari, 2024).

Model Pengelolaan Komunikasi Partisipatif Pariwisata Bahari

Model pengelolaan komunikasi partisipatif dalam pariwisata bahari menempatkan komunikasi sebagai elemen kunci dalam mengintegrasikan berbagai kepentingan pemangku kepentingan, khususnya masyarakat lokal, pemerintah, dan pelaku industri wisata. Pendekatan ini menekankan proses dialogis, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan lokal dalam setiap tahapan pengelolaan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Dalam konteks ini, komunikasi partisipatif tidak hanya berfungsi sebagai media pertukaran informasi, tetapi juga sebagai mekanisme pembentukan kesepahaman kolektif dan pengambilan keputusan bersama yang berorientasi pada keberlanjutan (Rery et al., 2026).

Tosun (2010), model partisipasi masyarakat dalam pariwisata sangat dipengaruhi oleh struktur komunikasi yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat lokal. Studi ini mengidentifikasi bahwa keterbatasan akses komunikasi dan dominasi aktor tertentu seringkali menghambat partisipasi yang efektif. Oleh karena itu, model pengelolaan komunikasi partisipatif perlu dirancang secara inklusif dengan membuka ruang dialog yang setara, sehingga masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan pariwisata bahari (Rompas & Hos, 2026).

Okazaki (2012), model *community-based tourism network* yang menekankan pentingnya komunikasi dalam membangun jaringan kolaboratif antar pemangku kepentingan. komunikasi yang terstruktur dan berkelanjutan mampu memperkuat koordinasi, meningkatkan kepercayaan, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata. Dalam konteks pariwisata bahari, model ini relevan untuk menjelaskan bagaimana komunikasi partisipatif dapat membangun sinergi antara masyarakat lokal, pemerintah, dan sektor swasta.

Bramwell dan Lane (2013) menyoroti pentingnya tata kelola (*governance*) dalam pariwisata berkelanjutan, di mana komunikasi menjadi elemen penting dalam menghubungkan berbagai aktor dalam sistem pariwisata (Asus et al., 2024). Studi ini menunjukkan bahwa model pengelolaan yang efektif memerlukan komunikasi yang transparan, inklusif, dan berorientasi pada kolaborasi. Dalam hal ini, komunikasi partisipatif berperan dalam menciptakan ruang deliberatif yang memungkinkan terjadinya negosiasi kepentingan dan pengambilan keputusan yang adil.

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Giampiccoli dan Saayman (2018) menekankan bahwa keberhasilan *community-based tourism* sangat bergantung pada kualitas komunikasi antara masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. komunikasi partisipatif mampu meningkatkan rasa memiliki (*sense of ownership*), memperkuat kapasitas lokal, serta mendorong keberlanjutan ekonomi dan sosial. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa kurangnya kapasitas komunikasi dan akses informasi menjadi hambatan utama dalam implementasi model tersebut (Rery et al., 2026).

Model pengelolaan komunikasi partisipatif dalam pariwisata bahari harus memenuhi beberapa prinsip utama, yaitu dialogis, inklusif, transparan, dan berbasis pada kolaborasi antar aktor. Model ini perlu mengintegrasikan komunikasi sebagai proses inti dalam membangun partisipasi masyarakat, memperkuat jaringan sosial, serta mendukung pengambilan keputusan kolektif. Dengan demikian, pengembangan model komunikasi partisipatif yang kontekstual dan adaptif menjadi sangat penting untuk menjawab tantangan pengelolaan pariwisata bahari yang berkelanjutan, khususnya pada komunitas lokal seperti masyarakat pesisir dan maritime (Asus et al., 2024).

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Pariwisata Bahari

Pemberdayaan masyarakat merupakan elemen kunci dalam pengelolaan pariwisata bahari berkelanjutan, karena menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam pemanfaatan dan pelestarian sumber daya pesisir. Dalam konteks ini, pemberdayaan tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan kapasitas ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial, kelembagaan, dan lingkungan. Model pemberdayaan yang efektif mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan destinasi wisata, sehingga tercipta keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan konservasi ekosistem laut. Rullyana Puspitaningrum Mamengko & Erlina Daru Kuntari (2021) pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan *community-based tourism* mampu meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir sekaligus memperkuat peran mereka dalam pengelolaan pariwisata bahari. hal ini menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata memberikan dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi lokal dan keberlanjutan destinasi (Permadi et al., 2025).

Hensroni Rompas & Jamaluddin Hos (2024) pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), pengembangan desa wisata, serta fasilitasi usaha mikro berbasis pariwisata. Pendekatan ini mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, meskipun masih menghadapi kendala infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia.

Nuddin Harahab (2024) *community-based tourism* pada ekowisata bahari di Clungup Mangrove Conservation, bahwa pemberdayaan masyarakat menjadi faktor utama dalam memastikan manfaat pariwisata dirasakan secara merata. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai pelaku wisata, tetapi juga sebagai pengelola utama yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan wisata. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan berkontribusi pada keberlanjutan sosial dan lingkungan dalam pengelolaan pariwisata bahari .

pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata bahari memiliki peran strategis dalam meningkatkan partisipasi, kapasitas, dan kemandirian masyarakat lokal. Namun demikian, keberhasilan pemberdayaan sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung seperti akses terhadap pelatihan, penguatan kelembagaan, serta komunikasi yang efektif antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, integrasi antara pemberdayaan masyarakat dan komunikasi partisipatif menjadi kunci dalam membangun model pengelolaan pariwisata bahari yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis kearifan lokal (Rery et al., 2026).

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena komunikasi partisipatif dalam pengelolaan pariwisata bahari. Pendekatan ini menghasilkan data berupa kata-kata tertulis maupun lisan yang diperoleh dari perilaku, pengalaman, serta interaksi sosial masyarakat yang diamati. Lokasi penelitian berada di kawasan wisata Pulau Labengki, Kabupaten Konawe Utara, yang merupakan wilayah dengan potensi pariwisata bahari dan komunitas masyarakat Bajo sebagai aktor utama dalam pengelolaan wisata.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung untuk mengamati kondisi lingkungan, aktivitas pariwisata bahari, serta praktik komunikasi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata. Observasi ini juga mencakup interaksi antar masyarakat, serta hubungan antara masyarakat dengan wisatawan dan pihak eksternal lainnya (Anto et al., 2024).

Wawancara dilakukan secara mendalam dan bersifat semi-terstruktur, sehingga memberikan ruang bagi informan untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, dan pemaknaan mereka secara terbuka terkait pengelolaan pariwisata bahari. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive, yaitu berdasarkan keterlibatan langsung dalam pengelolaan pariwisata bahari di Pulau Labengki.

No	Inisial	Jabatan/Peran	Usia	Keterlibatan dalam Pariwisata
1	KMR	Kepala Desa	54	Pengambil kebijakan desa
2	PUM	Ketua Pokdarwis	40	Koordinator kegiatan wisata
3	HRL	Masyarakat (Pengelola Homestay)	46	Pelayanan wisata & homestay
4	SKD	Sekretaris Desa	43	Administrasi & koordinasi
5	MBR	Masyarakat Bajo	38	Pemandu wisata / transportasi laut

Selain itu, dokumentasi digunakan sebagai teknik pendukung untuk melengkapi data penelitian. Dokumentasi berupa catatan resmi, arsip kelembagaan, serta dokumentasi visual seperti foto kegiatan pariwisata, aktivitas masyarakat, dan kondisi lingkungan digunakan untuk memperkuat hasil temuan di lapangan.

Analisis data dilakukan secara induktif dengan tujuan mengembangkan pemahaman dan konseptualisasi model komunikasi partisipatif berdasarkan data empiris yang diperoleh (Naamy, 2022). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan partisipatif, di mana peneliti melakukan tinggal lapangan selama ±7 hari di Pulau Labengki dengan terlibat dalam aktivitas masyarakat seperti, Menghadiri pertemuan kelompok Pokdarwis, Mengamati aktivitas pelayanan wisata (pengantaran wisatawan, interaksi pemandu wisata) serta interaksi sosial sehari-hari. Untuk menjaga objektivitas, penelitian menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data mengacu pada model yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, yang meliputi empat tahapan, yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Melalui tahapan ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola, hubungan, serta makna yang terkandung dalam praktik komunikasi partisipatif masyarakat Bajo dalam pengelolaan pariwisata bahari, sehingga menghasilkan model yang kontekstual dan aplikatif (Nurdin & Hartati, 2019).

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan pariwisata bahari di Pulau Labengki berkembang secara bertahap dengan melibatkan masyarakat Bajo sebagai aktor utama dan tour travel labengki sebagai peneydia open trip dalam berbagai aktivitas wisata. Keterlibatan ini tercermin dalam penyediaan jasa transportasi laut, pemandu wisata, pengelolaan *homestay*, hingga pengaturan destinasi seperti *spot snorkeling*. Peran masyarakat tidak hanya bersifat operasional, tetapi juga mencerminkan kemampuan adaptasi terhadap peluang ekonomi yang muncul dari sektor pariwisata. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Bajo telah menjadi bagian integral dalam sistem pengelolaan pariwisata (Wa Ode Astuti, 2025).

Kedekatan masyarakat Bajo dengan lingkungan laut menjadi landasan utama dalam praktik pengelolaan pariwisata bahari. Nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun, seperti menjaga keseimbangan ekosistem laut dan menghormati alam sebagai sumber kehidupan, menjadi prinsip dalam aktivitas wisata. Praktik ini tercermin dalam cara masyarakat mengelola sumber daya laut secara bijak, seperti membatasi aktivitas yang berpotensi merusak terumbu karang dan menjaga kebersihan lingkungan pesisir. Dengan demikian, pengelolaan pariwisata tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan (Harlina et al., 2023).

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata di Pulau Labengki masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam aspek sumber daya manusia. Belum adanya sumber daya manusia yang memiliki keahlian untuk mengelola media sosial untuk melakukan pemasaran secara sistematis menyebabkan pengelolaan wisata berjalan secara informal dan bergantung pada inisiatif individu atau operator trip yang khusus menyediakan paket wisata labengki. Kondisi ini berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan dan kurangnya standar operasional dalam pelayanan wisatawan serta belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara kolektif.

Selain itu, koordinasi antar pemangku kepentingan, seperti masyarakat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha wisata, belum berjalan secara efektif. Komunikasi yang terjadi masih bersifat sporadis dan belum terintegrasi dalam suatu mekanisme yang terstruktur. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan informasi serta potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan pariwisata. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa meskipun partisipasi masyarakat sudah terlihat, namun belum didukung oleh sistem komunikasi yang kuat dan berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, komunikasi menjadi elemen kunci yang berperan dalam menghubungkan berbagai aktor dalam pengelolaan pariwisata bahari. Komunikasi yang efektif dan partisipatif dapat menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi, membangun kesepahaman, serta mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Komunikasi Partisipatif dalam Pengelolaan Pariwisata Bahari

komunikasi partisipatif dalam pengelolaan pariwisata bahari di Pulau Labengki tidak hanya berlangsung dalam forum formal seperti musyawarah, tetapi juga terintegrasi dalam praktik sosial sehari-hari masyarakat Bajo. Komunikasi berkembang secara alami melalui interaksi antar warga, diskusi informal, serta jaringan sosial komunitas yang memungkinkan pertukaran informasi, pengalaman, dan pengetahuan lokal secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, komunikasi tidak sekadar menjadi alat penyampaian informasi, tetapi berfungsi sebagai mekanisme sosial yang membentuk keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pengelolaan pariwisata.

Keberadaan forum seperti pertemuan Pokdarwis, musyawarah dusun, dan musyawarah desa tetap menjadi ruang penting dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh Pahda Umar, Ketua Pokdarwis Singgapore: *"kalau kita disini biasanya masyarakat menyampaikan kepada pokdarwis kalau ada masukan-*

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

masukan terkait dengan pariwisata baik melalui forum resmi yang di adakan pokdarwis ataupun secara langsung" (4 November 2025). Pernyataan ini menunjukkan bahwa komunikasi partisipatif tidak hanya berlangsung dalam ruang formal, tetapi juga melalui interaksi langsung yang lebih fleksibel.

Hal tersebut diperkuat oleh wawancara dengan Herlina, masyarakat Pulau Labengki, yang menyatakan: *"untuk informasi terkait pariwisata kita sampaikan melalui forum yang di adakan pokdarwis dan kita semua warga di undang dalam kegiatan tersebut, jadi kalau ada yang kita mau kasih masukan biasanya kita sampaikan disitu tapi begitumi kadang ada masyarakat yang tidak hadir, tidak tahu juga kenapa mereka tidak hadir"* (4 November 2025). Kutipan ini menunjukkan bahwa meskipun ruang komunikasi telah tersedia, tingkat partisipasi masyarakat belum sepenuhnya merata.

Karakter komunikasi yang berkembang dalam masyarakat Bajo menunjukkan pola komunikasi yang berbasis relasi sosial, di mana kepercayaan, kedekatan kekerabatan, dan pengalaman bersama menjadi faktor utama dalam membangun interaksi. Namun demikian, tidak semua anggota masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang sama. Sebagian individu cenderung lebih aktif dan dominan dalam menyampaikan pendapat, sementara sebagian lainnya masih bersifat pasif. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor sosial seperti status, pengalaman, serta posisi individu dalam struktur komunitas. Selain itu, dinamika komunikasi juga memperlihatkan adanya pengaruh aktor-aktor tertentu, seperti kelompok Pokdarwis Singgapore dan individu yang memiliki posisi sosial lebih kuat. Kelompok ini seringkali berperan sebagai mediator sekaligus pengarah komunikasi, sehingga memiliki pengaruh dalam menentukan arah diskusi. Meskipun peran tersebut penting dalam menjaga koordinasi dan stabilitas sosial, dominasi yang terjadi berpotensi membatasi ruang partisipasi bagi sebagian masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi partisipatif yang berlangsung belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kesetaraan. Partisipasi masyarakat memang terbuka, tetapi tidak semua individu memiliki peluang yang sama untuk mempengaruhi hasil komunikasi. Dengan demikian, komunikasi yang terjadi cenderung bersifat relasional dan terstruktur secara sosial, di mana keterlibatan individu dipengaruhi oleh posisi sosial, pengalaman, serta jaringan relasi dalam komunitas. Dalam perspektif komunikasi partisipatif, temuan ini sejalan sekaligus memperluas pemikiran Paulo Freire yang menekankan pentingnya dialog sebagai dasar pemberdayaan. Namun, dalam konteks masyarakat Bajo, dialog tidak selalu berlangsung dalam bentuk diskursus formal yang setara, melainkan berkembang melalui praktik komunikasi yang kontekstual dan berbasis pengalaman sosial. Dengan demikian, komunikasi partisipatif dalam masyarakat Bajo dapat dipahami sebagai bentuk komunikasi dialogis yang terlokalisasi, di mana prinsip partisipasi dinegosiasikan dengan struktur sosial dan budaya komunitas.

Oleh karena itu, penguatan komunikasi partisipatif dalam pengelolaan pariwisata bahari tidak hanya memerlukan perluasan ruang dialog formal, tetapi juga penguatan kapasitas komunikasi masyarakat, peningkatan inklusivitas, serta pengakuan terhadap praktik komunikasi lokal yang telah berkembang. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa komunikasi tidak hanya menjadi sarana pertukaran informasi, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan yang mampu mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih adil dan bermakna.

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Model Partisipatif Pengelolaan Pariwisata Bahari



Gambar 1. Model partispatif pengelolaan pariwisata Bahari oleh Masyarakat bajo di pulau labengki

Perencanaan Partisipatif Dalam Pengelolaan Pariwisata Bahari Di Pulau Labengki. Keterlibatan masyarakat sebagai aktor utama dalam menentukan arah pengembangan wisata. Hasil penelitian mengungkap bahwa proses perencanaan dilakukan melalui musyawarah kelompok yang melibatkan tokoh masyarakat, pelaku usaha wisata, serta masyarakat Bajo. Forum ini menjadi ruang dialog untuk membahas potensi wisata, seperti keindahan laut dan pulau-pulau kecil, sekaligus merumuskan kebutuhan pengembangan, termasuk fasilitas pendukung dan pembagian peran dalam pengelolaan wisata. Praktik ini mencerminkan adanya kesadaran kolektif masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal secara bersama. Wawancara dengan Kamaruddin, kepala desa Labengki, ia mengungkapkan *"kalau untuk pengelolaan pariwisata kita selalu libatkan masyarakat, baik itu musyawarah dusun (musdus), ataupun musyawarah desa (musdes) ada juga kelompok pokdarwis yang biasa mengadakan pertemuan dengan mengundang desa kadang juga ada masyarakat yang menyampaikan secara langsung mereka punya aspirasi"* (4 November 2025).

Proses perencanaan tersebut pada dasarnya telah mencerminkan prinsip komunikasi partisipatif yang bersifat dialogis dan terbuka. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga terlibat dalam penyampaian ide, aspirasi, serta pengalaman mereka terkait pengelolaan pariwisata. Diskusi yang berlangsung memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan lokal dan pengalaman praktis yang dimiliki masyarakat Bajo, sehingga perencanaan yang dihasilkan lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan demikian, perencanaan partisipatif berfungsi sebagai sarana untuk membangun kesepahaman dan komitmen bersama dalam pengelolaan pariwisata bahari hasil dari dari musyawarah kemudian di tindak lanjuti dengan membuat perdes terkait dengan pengelolaan pariwisata yang melibatkan masyarakat. Pahda Umar, ketua pokdarwis singgapore, mengatakan "*perencanaan biasanya kita di undang dalam musdus ataupun musdes untuk memberikan masukan supaya pariwisata di labengkin jauh lebih*

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

bagus, masyarakat juga di libatkan tapi kadang karena bertepatan dengan waktunya mereka melaut jadi tidak sempat hadir" (5 November 2025). Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan yang dilakukan telah berjalan dengan baik tetapi dengan kondisi masyarakat yang memiliki mata pencaharian dari melaut sehingga waktu yang dimiliki oleh masyarakat untuk terlibat dalam musyawarah itu terbatas. Selain itu, proses perencanaan cenderung bergantung pada inisiatif individu atau kelompok tertentu yang memiliki pengaruh dalam komunitas. Hal ini berimplikasi pada kurang optimalnya koordinasi dan kesinambungan program pengembangan pariwisata.

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan belum sepenuhnya inklusif. Beberapa kelompok masyarakat masih belum terakomodasi secara merata, baik karena faktor sosial, tingkat pendidikan, maupun keterbatasan akses terhadap informasi. Wawancara dengan Sekretaris Desa, ia menyampaikan bahwa *"tidak semua masyarakat hadir kalau kita undang dan mau terlibat aktif baik itu musyawarah dusun ataupun musyawarah desa karena biasa mereka sudah sampaikan melalui Pokdarwis"* (5 November 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun perencanaan partisipatif telah berjalan, masih diperlukan penguatan dalam aspek kelembagaan, kapasitas masyarakat, serta mekanisme komunikasi yang lebih terbuka dan sistematis. Dengan demikian, perencanaan partisipatif dapat berkembang menjadi proses yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan dalam mendukung pengelolaan pariwisata bahari.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perencanaan partisipatif dalam pengelolaan pariwisata bahari di Pulau Labengki telah mengakomodasi prinsip komunikasi dialogis melalui forum musyawarah desa dan dusun yang menjadi ruang masyarakat Bajo menyampaikan aspirasi, pengalaman, dan keterlibatan dalam perumusan kebijakan. Namun, praktik komunikasi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan model dialogis ideal sebagaimana dikemukakan Paulo Freire, karena partisipasi masyarakat masih dipengaruhi faktor kontekstual seperti aktivitas melaut, dominasi aktor tertentu, serta ketergantungan pada perwakilan kelompok seperti Pokdarwis. Kondisi ini menunjukkan adanya *communication asymmetry* yang membatasi keterlibatan langsung sebagian masyarakat.

Meskipun demikian, model komunikasi partisipatif masyarakat Bajo tidak sepenuhnya menolak konsep Freire, melainkan memodifikasinya secara kontekstual sesuai realitas sosial-budaya masyarakat maritim. Dialog tidak hanya berlangsung dalam forum formal, tetapi juga melalui relasi sosial, representasi komunitas, dan komunikasi informal sehari-hari. Temuan ini memperluas perspektif Jan Servaes mengenai komunikasi pembangunan *bottom-up*, bahwa partisipasi dipengaruhi struktur sosial, pola mata pencaharian, dan budaya komunikasi lokal. Dengan demikian, model komunikasi masyarakat Bajo dapat dipahami sebagai model hibrid yang menggabungkan prinsip komunikasi modern dengan kearifan lokal.

Pengelolaan Berbasis Komunitas (*Community-Based Management*)

pariwisata bahari di Pulau Labengki menunjukkan bahwa masyarakat Bajo berperan sebagai aktor utama dalam menjalankan berbagai aktivitas wisata. Keterlibatan ini terlihat nyata dalam penyediaan layanan transportasi laut, jasa pemandu wisata, pengelolaan homestay, serta pengaturan kunjungan ke destinasi seperti spot snorkeling dan pulau-pulau kecil. Peran tersebut tidak hanya mencerminkan keterlibatan ekonomi, tetapi juga menunjukkan adanya kontrol langsung masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya wisata di wilayah mereka. Wawancara dengan herlina, masyarakat pulau labengki."*kalau homestay di kelola langsung sama masyarakat, kadang kalau ada tamu ta juga biasa kita panggil tetangga untuk bantu-bantu jadi kita libatkan juga mereka yang tidak punya homestay. Banyak juga yang pemandu wisata tapi kalau ada perahunya mereka mengantar tamu biasanya"* (5 November 2025).

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Model pengelolaan ini berkembang secara organik berdasarkan kebutuhan dan pengalaman masyarakat dalam memanfaatkan potensi lokal. Masyarakat Bajo memanfaatkan pengetahuan tradisional mereka tentang kondisi laut, cuaca, serta ekosistem pesisir dalam memberikan layanan wisata yang aman dan autentik. Selain itu, praktik pengelolaan juga mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal, seperti menjaga keseimbangan alam dan tidak mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan. Hal ini menjadikan pengelolaan berbasis komunitas tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan.

Kekuatan utama dari model ini terletak pada tingginya modal sosial yang dimiliki masyarakat. Kepercayaan antar anggota komunitas, solidaritas sosial, serta hubungan kekerabatan yang erat menjadi faktor penting dalam mendukung kerja sama dan koordinasi. Dengan adanya modal sosial ini, masyarakat mampu mengelola aktivitas wisata secara kolektif tanpa bergantung sepenuhnya pada sistem formal. Informasi dan koordinasi dapat berjalan dengan cepat melalui jaringan sosial yang sudah terbentuk secara alami dalam kehidupan sehari-hari. Wawancara dengan Sekretaris Desa, ia mengungkapkan bahwa "*Masyarakat disini pernahmi di kasih pelatihan-pelatihan baik itu cara melayani tamu, kemudian standar homestay ataupun pembuatan souvenir hanya kita susah buat mungkin karena kita punya keterbatasan pendidikan juga yang menjadi persoalan*" *"*(5 November 2025). Pengelolaan berbasis komunitas ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek kapasitas manajerial dan kelembagaan. Keterbatasan dalam perencanaan usaha, pengelolaan keuangan, serta standar pelayanan wisata menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas pengelolaan. Selain itu, kualitas sumber daya manusia yang belum merata menyebabkan pembagian peran dan tanggung jawab belum berjalan secara optimal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam distribusi manfaat serta kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan wisata.

Pengelolaan pariwisata bahari berbasis komunitas di Pulau Labengki memerlukan penguatan organisasi komunitas agar dapat berkembang secara lebih profesional dan berkelanjutan. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui pendampingan kelembagaan lokal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan aspek manajerial dan komunikasi. Dengan dukungan tersebut, pengelolaan berbasis komunitas tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat keberlanjutan pariwisata bahari. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata di Pulau Labengki tidak hanya ditopang oleh struktur kelembagaan formal, tetapi juga oleh praktik komunikasi berbasis modal sosial, seperti kepercayaan, solidaritas, dan relasi kekerabatan masyarakat Bajo. Proses koordinasi, distribusi informasi, dan pengambilan keputusan sehari-hari lebih banyak berlangsung melalui komunikasi informal yang terintegrasi dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dalam perspektif Jan Servaes, model ini mencerminkan prinsip *bottom-up communication*, di mana masyarakat menjadi aktor utama dalam mengelola sumber daya lokal. Namun, komunikasi partisipatif masyarakat Bajo berkembang secara organik melalui jaringan sosial dan praktik keseharian, bukan hanya melalui struktur formal. Sementara itu, dalam perspektif Paulo Freire, partisipasi idealnya dibangun melalui dialog kritis dan emansipatoris. Akan tetapi, pada masyarakat Bajo, kesadaran kolektif dan partisipasi lebih banyak tumbuh melalui pengalaman langsung dan praktik bersama dalam aktivitas pariwisata. Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan adanya keterbatasan kapasitas komunikasi, terutama dalam aspek manajerial, pengelolaan informasi, dan standar pelayanan. Temuan ini menegaskan bahwa komunikasi partisipatif masyarakat Bajo bersifat kontekstual, di mana komunikasi informal dan modal sosial menjadi elemen utama dalam pengelolaan berbasis komunitas serta memodifikasi teori komunikasi partisipatif Barat sesuai dengan realitas budaya lokal.

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Pengambilan Keputusan Secara Partisipatif

Proses pengambilan keputusan pada umumnya dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti musyawarah kelompok Pokdarwis, musyawarah dusun, dan musyawarah desa. Forum musyawarah menjadi ruang utama bagi masyarakat Bajo untuk membahas berbagai isu, seperti pembagian tugas, pengelolaan destinasi wisata, hingga penyelesaian konflik yang muncul dalam praktik di lapangan. Mekanisme ini mencerminkan nilai-nilai kolektivitas yang kuat dalam kehidupan sosial masyarakat, di mana keputusan diupayakan untuk dihasilkan melalui kesepakatan bersama. Wawancara dengan Kamaruddin, Kepala Desa Labengki, mengungkapkan bahwa "*ada perdes yang mengatur tentang pengelolaan pariwisata disini, perdes itu berdasarkan musyawarah dengan masyarakat, jadi hasilnya kita musyawarah di bikinkanmi perdes*" (4 November 2025). Dalam praktiknya, pengambilan keputusan berlangsung melalui diskusi yang bersifat terbuka dan fleksibel, baik dalam forum formal maupun informal. Interaksi sehari-hari, seperti percakapan di lingkungan tempat tinggal atau saat bekerja di laut, juga menjadi bagian dari proses pembentukan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi partisipatif tidak hanya terjadi dalam ruang formal, tetapi juga terintegrasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan menjadi bagian dari dinamika sosial yang terus berlangsung.

Pengelolaan pariwisata bahari berbasis komunitas di Pulau Labengki tidak hanya ditopang oleh struktur kelembagaan formal, tetapi juga oleh praktik komunikasi berbasis modal sosial seperti kepercayaan, solidaritas, dan relasi kekerabatan masyarakat Bajo. Proses koordinasi, distribusi informasi, serta pengambilan keputusan sehari-hari lebih banyak berlangsung melalui komunikasi informal yang terintegrasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi tidak sekadar berfungsi sebagai alat koordinasi, tetapi menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlangsungan pengelolaan pariwisata berbasis komunitas. Dalam perspektif Jan Servaes, model ini mencerminkan prinsip *bottom-up communication*, namun praktik komunikasi partisipatif masyarakat Bajo berkembang secara organik melalui jaringan sosial dan pengalaman keseharian, bukan semata-mata melalui struktur formal.

Dalam perspektif Paulo Freire, komunikasi partisipatif idealnya membangun kesadaran kritis melalui dialog reflektif. Akan tetapi, pada masyarakat Bajo, partisipasi tumbuh melalui praktik kolektif dan pengalaman langsung dalam pengelolaan pariwisata. Di sisi lain, masih terdapat keterbatasan kapasitas komunikasi, terutama dalam aspek manajerial dan pelayanan wisata. Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi partisipatif masyarakat Bajo bersifat kontekstual, di mana komunikasi informal dan modal sosial menjadi elemen utama dalam pengelolaan berbasis komunitas serta memodifikasi teori komunikasi partisipatif Barat sesuai dengan realitas budaya lokal.

Evaluasi Partisipatif dalam Pengelolaan Pariwisata

Evaluasi partisipatif dalam pengelolaan pariwisata bahari di Pulau Labengki pada umumnya masih dilakukan secara formal dan informal, tetapi belum maksimal dalam suatu sistem yang jelas. Masyarakat Bajo melakukan evaluasi melalui musyawarah dan interaksi sehari-hari, baik melalui Pokdarwis, pemerintah desa, percakapan antar warga, diskusi spontan, maupun obrolan setelah aktivitas wisata berlangsung. Topik yang dibahas biasanya berkaitan dengan pengalaman wisatawan, kondisi lingkungan, serta pembagian peran dan hasil dalam kegiatan pariwisata. Proses evaluasi yang berlangsung secara formal dan informal ini mencerminkan adanya kesadaran masyarakat untuk melakukan refleksi terhadap praktik pengelolaan yang telah berjalan. Masyarakat secara aktif merespons berbagai permasalahan yang muncul, seperti keluhan wisatawan terkait pelayanan, kerusakan terumbu karang akibat aktivitas wisata, maupun ketidakseimbangan dalam pembagian manfaat ekonomi. Dengan demikian, evaluasi tetap

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

terjadi sebagai bagian dari dinamika sosial, meskipun terkadang tidak dilakukan secara sistematis. Namun demikian, evaluasi yang berlangsung cenderung bersifat spontan, reaktif, dan tidak berkelanjutan. Artinya, evaluasi dilakukan hanya ketika muncul masalah tertentu, tanpa adanya mekanisme yang mampu menilai kinerja pengelolaan secara menyeluruh. Kondisi ini menyebabkan banyak potensi perbaikan tidak teridentifikasi secara optimal karena tidak adanya proses evaluasi yang berkesinambungan. Akibatnya, pengelolaan pariwisata berjalan tanpa arah evaluasi yang jelas sebagai dasar pengambilan keputusan berikutnya.

Ketiadaan mekanisme evaluasi yang sistematis juga berdampak pada sulitnya mengukur keberhasilan pengelolaan pariwisata secara komprehensif. Masyarakat belum memiliki indikator yang jelas untuk menilai aspek-aspek penting seperti kualitas layanan, keberlanjutan lingkungan, maupun manfaat ekonomi yang dihasilkan. Selain itu, tidak adanya dokumentasi hasil evaluasi menyebabkan informasi yang diperoleh dari pengalaman sebelumnya tidak tersimpan dengan baik, sehingga sulit dijadikan referensi untuk perbaikan di masa mendatang. Lebih lanjut, minimnya dokumentasi dan sistem evaluasi juga menghambat proses pembelajaran kolektif dalam komunitas. Pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman praktis cenderung bersifat individual atau terbatas pada kelompok tertentu, sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara luas oleh seluruh masyarakat. Hal ini berpotensi menghambat pengembangan kapasitas komunitas dalam mengelola pariwisata secara lebih efektif dan profesional.

Oleh sebab itu, diperlukan pengembangan sistem evaluasi partisipatif yang lebih terstruktur dan terintegrasi dalam pengelolaan pariwisata bahari. Sistem ini dapat dirancang melalui forum evaluasi rutin, penyusunan indikator keberhasilan bersama, serta pencatatan hasil evaluasi secara sederhana namun sistematis. Dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat dalam proses evaluasi, diharapkan tercipta mekanisme pembelajaran kolektif yang mampu mendorong perbaikan berkelanjutan serta meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata bahari di Pulau Labengki.

PENUTUP

Model komunikasi partisipatif dalam pengelolaan pariwisata bahari di Pulau Labengki telah terbentuk secara alami melalui praktik sosial masyarakat Bajo. Komunikasi berlangsung secara dialogis melalui musyawarah dan interaksi sehari-hari, yang memungkinkan masyarakat terlibat dalam berbagai tahapan pengelolaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya berperan sebagai pelaku, tetapi juga sebagai subjek utama dalam pengelolaan pariwisata berbasis komunitas.

Dalam aspek perencanaan, masyarakat telah dilibatkan melalui forum musyawarah, baik secara formal maupun yang bersifat informal dan belum terdokumentasi secara sistematis. Pada tahap pengelolaan, masyarakat Bajo berperan aktif dalam menyediakan layanan wisata dan menjaga kelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal. Sementara itu, dalam pengambilan keputusan, mekanisme partisipatif telah berjalan melalui diskusi bersama, namun belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kesetaraan akibat adanya dominasi kelompok tertentu. Adapun dalam tahap evaluasi, praktik yang dilakukan masih bersifat spontan dan reaktif, serta belum terintegrasi dalam sistem evaluasi yang terstruktur.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan utama model partisipatif terletak pada tingginya modal sosial masyarakat, seperti kepercayaan, solidaritas, dan hubungan kekerabatan. Namun demikian, model ini masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam aspek kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, serta sistem komunikasi yang belum terstruktur secara optimal. Oleh karena itu, model komunikasi partisipatif yang ada dapat dikategorikan sebagai model berbasis komunitas yang bersifat adaptif, namun masih memerlukan penguatan agar lebih efektif dan berkelanjutan.

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat relevansi komunikasi partisipatif sebagai pendekatan dalam pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat. Penelitian ini juga memberikan kontribusi konseptual berupa integrasi empat dimensi utama, yaitu perencanaan partisipatif, pengelolaan berbasis komunitas, pengambilan keputusan kolektif, dan evaluasi partisipatif, sebagai satu kesatuan model pengelolaan pariwisata bahari.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan penguatan perencanaan partisipatif melalui penyusunan pengelolaan pariwisata yang lebih terstruktur, inklusif, dan terdokumentasi. Penguatan kelembagaan komunitas, khususnya Pokdarwis, penting dilakukan untuk memperjelas pembagian peran dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan wisata. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Bajo melalui pelatihan komunikasi, manajemen pariwisata, dan literasi digital diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan dan daya saing destinasi. Mekanisme pengambilan keputusan juga perlu dibuat lebih inklusif dan transparan agar partisipasi masyarakat bersifat substantif. Di sisi lain, pengembangan sistem evaluasi partisipatif yang terstruktur penting dilakukan melalui evaluasi berkala dan dokumentasi hasil evaluasi. Implementasi rekomendasi ini diharapkan mampu memperkuat komunikasi partisipatif dan mendukung keberlanjutan pariwisata bahari di Pulau Labengki.

UCAPAN TERIMA KASIH

Seluruh rangkaian pelaksanaan penelitian ini, sejak tahap perencanaan, pengumpulan data, hingga penyusunan laporan akhir, tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) atas dukungan pendanaan yang telah diberikan sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh informan, khususnya masyarakat Bajo di Pulau Labengki, pengelola wisata, pemerintah, serta pihak terkait yang telah berpartisipasi aktif dengan memberikan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

DAFTAR PUSTAKA

Anto, R. P., Nur, N., Yusriani, Ardah, F. K., Ayu, J. D., Nurmahdi, A., Apriyeni, B. A. R., Purwanti, Adrianingsih, arita Y., & Putra, M. F. P. (2024). Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Penerapannya. In *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.* (Vol. 2).

Asus, S. T. K., Lungup, D. I. C., Onservation, M. A. C., & Alang, K. A. M. (2024). *KONSEP COMMUNITY-BASED TOURISM DALAM PENGELOLAAN EKOWISATA BAHARI (STUDI KASUS DI CLUNGUP MANGROVE CONSERVATION, KABUPATEN MALANG) THE*. *March*.

Bintan, K., & Riau, K. (2024). *MODEL PENGELOLAAN WISATA BAHARI BERKELANJUTAN DI KABUPATEN BINTAN, KEPULAUAN RIAU*. *6*(1), 1–9.

Harlina, I., Anggriani, J., & Samosir, T. (2023). Peran Desa Wisata Bahari Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Di Kepulauan Labengki Kabupaten Konawe Utara Sulawesi Tenggara. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, *10*(2), 369–378. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.29544

Latzlawick, P. (2013). *MODEL KOMUNIKASI KYAI DENGAN SANTRI DI PESANTREN*.

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Naamy, N. (2022). METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF Dasar-Dasar & Aplikasinya. In *Rake Sarasin* (Issue Maret). https://repository.uinmataram.ac.id/2853/1/buku Metode Penelitian.pdf

Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). Metodologi Penelitian Sosial. In L. Lutfiah (Ed.), *Media Sahabat Cendekia* (I). Media Sahabat Cendekia. https://doi.org/10.11594/ubpress9786232967496

Ode, W., Nurhaliza, S., Hidayanto, S., Tarifu, L., Bhayangkara, U., Raya, J., & Oleo, U. H. (2023). *KOMUNIKASI PARTISIPATIF MASYARAKAT BAJO MOLA RAYA DALAM PENGEMBANGAN DESA DI KABUPATEN WAKATOBI*. *8*(3), 571–586.

Permadi, W. K., Wanusmawatie, I., & Khairina, D. R. (2025). *Pengembangan Desa Wisata Berbasis Community Based Tourism (CBT) dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi (Systematic Literature Review Pada Penerapan Society Centered Approach dalam Pengembangan Pariwisata Desa)*. *9*, 22654–22661.

Ratnasari, K. (2024). *PENGEMBANGAN DESA BERBASIS COMMUNITY BASED TOURISM (CBT) DI DESA WISATA KREATIF TERONG*. *3*(April), 155–163.

Rery, S., Jaya, M. N., Sulistiani, I., Studi, P., Komunikasi, I., Papua, U. M., & Jayapura, K. (2026). *Integrasi Kearifan Lokal melalui Strategi Komuniasi Pengembangan Pariwisata di Perbatasan RI-PNG*. *5*(1), 74–88. https://doi.org/10.54259/mukasi.v5i1.5534

Rompas, H., & Hos, J. (2026). *Pemberdayaan Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Pariwisata Bahari : Studi Kasus Kabupaten Buton Selatan*. *7*(1), 95–106.

Wa Ode Astuti, E. A. M. (2025). KARAKTERISTIK MASYARAKAT PESISIR SUKU BAJO DI PULAU WAKATOBI. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, *9*(11), 1–10.

Wisata, M., Mamengko, R. P., Yogyakarta, U. N., Pariwisata, A., Wisata, B., & Artikel, H. (2020). *PENGELOLAAN PARIWISATA BAHARI BERBASIS COMMUNITY-BASED PENGELOLAAN PARIWISATA BAHARI BERBASIS COMMUNITY-BASED TOURISMDALAM PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR*. *18*, 1–20. https://doi.org/10.36275/mws.

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)